

SEMINAR NASIONAL KESIAPAN INDONESIA DALAM PASAR BEBAS ASEAN MELALUI PENGUATAN IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE YANG SEHAT

**Oleh : DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.Si., Akt.
Anggota DPR/MPR-RI No.A – 111**

**Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
27 dan 28 Agustus 2015**



PROFIL : DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota KOMISI XI DPR RI DAPIL V (Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten) - FRAKSI PKS



Lahir di Purworejo 25 Agustus 1968, Alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, dan Program Doktorat Universitas Sebelas Maret dengan judul disertasi :

BOARD GOVERNANCE DAN MANDATORY DISCLOSURE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA NON-KEUANGAN DI INDONESIA.

Sebelumnya aktif sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mengelola usaha penerbitan dengan bendera Era Group di Jawa Tengah.



IKAPI
Ikatan Penerbit Indonesia

Sekretariat :

Jl. Kalipasir No. 32, Jakarta Pusat 10330
Telp. 021-314 1907 | Faks. 021-314 6050
email : ikapi@cbn.net.id

PENDAHULUAN



□ Tujuh puluh tahun Republik Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus kesempatan berharga untuk melakukan refleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan dari negara di dunia menjadi bagian dari hak kemerdekaan yang telah diperoleh Republik Indonesia.

SEJARAH AEC / MEA

- ❑ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun 1992 di Singapura. Pertemuan Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) kelima tersebut membentuk ASEAN (ASEAN Free Trade Agreement/AFTA) di tahun 2002.
- ❑ Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 dibentuk MEA di Kuala Lumpur, Malaysia.
- ❑ Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 disepakati dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali, Indonesia pada 7 Oktober 2003.



**Siapkah
Kita?**

PELUANG MEA

Dampak positif atau peluang dari momentum MEA diantaranya :

1. Pemasaran barang & jasa ASEAN berjumlah sekitar 625 juta orang atau hampir setara dengan 3x lipat pasar di Indonesia. Biaya ekspor dan impor yang menjadi lebih murah.
2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga ahli (bersertifikasi) memiliki kesempatan lebih luas bekerja di Negara Anggota ASEAN dan sebaliknya.
3. Ruang investasi antar negara ASEAN lebih terbuka bagi investor Indonesia dan sebaliknya Indonesia dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN.



ANCAMAN MEA

- Hambatan dalam MEA di antaranya :
- Kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia masih rendah
- Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang.
- Keterbatasan pasokan energi.
- Sektor industri yang lemah dan masih mengandalkan sektor komoditas seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya di mana ketersediaannya semakin menipis.
- Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor khususnya dari negeri Tiongkok.
- Korupsi di semua sektor Indonesia.



HAL TERDEKAT YANG DILAKUKAN DPR RI

Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015, salah satu yang diusulkan oleh Komisi XI DPR RI dalam menyambut MEA adalah "RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan'.

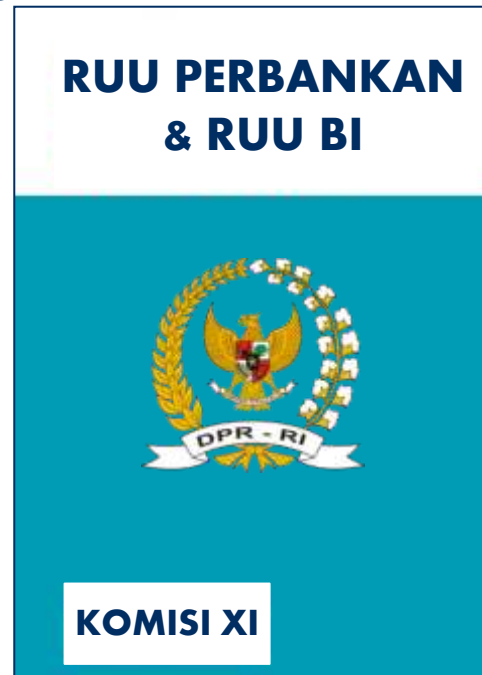
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan mengusung **prinsip resiprokal** atau perlakuan yang sama untuk mengikuti perkembangan bisnis perbankan di dunia.



HAL TERDEKAT YANG DILAKUKAN DPR RI

Bank Mandiri, BRI dan BNI memiliki potensi untuk masuk *top ten ASEAN*. Saat ini **Bank Mandiri** sudah berada di **posisi sebelas besar ASEAN** dengan **kapitalisasi pasar sebesar US\$ 19,98 miliar** disusul oleh **Bank BNI** dengan **kapitalisasi pasar sebesar sebesar US\$ 9,18 miliar**. Oleh karena itu Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di tingkat ASEAN.

Dan DPR RI akan mendukung melalui UU terkait seperti RUU Perbankan & RUU BI.



HAL TERDEKAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

- ❑ Pemerintah melalui kebijakannya dapat mendorong pelaku usaha (swasta) dan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi MEA.
- ❑ Pemerintah melalui bidang pendidikan dapat melakukan pengembangan kurikulum dan penguatan aktor pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan MEA.
- ❑ Sosialisasi terkait MEA melalui iklan layanan masyarakat perlu ditingkatkan.
- ❑ Pemerintah mempersiapkan strategi *offensive* dan *defensive* dalam perindustrian.



PERAN SELURUH STAKEHOLDER

Semua stakeholder harus bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Tahun	Peringkat	IPK (skala 0-10)	Keterangan
2004	133 dari 146 negara	2.0	Korup
2005	137 dari 159 negara	2.2	Korup
2006	130 dari 163 negara	2.4	Korup
2007	143 dari 180 negara	2.3	Korup
2008	126 dari 180 negara	2.6	Korup
2009	111 dari 180 negara	2.8	Korup
2010	110 dari 178 negara	2.8	Korup
2011	100 dari 182 negara	3.0	Korup
2012	118 dari 174 negara	3.2	Korup
2013	114 dari 177 negara	3.2	Korup
2014	107 dari 174 negara	3.4	Korup

Tabel 1: Peringkat dan Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Market ranking & scores, 2014

CG Watch market score: 2010 to 2014

%	2010	2012	2014	Change 2012 vs 2014 (ppt)	Trend of CG reform
1. = Hong Kong	66	66	68	(-1)	Weak leadership, tough enforcement
1. = Singapore	67	69	64	(-5)	International vs local contrast continues
3. = Japan	57	55	60	(+5)	Landmark changes, can they be sustained?
4. = Thailand	55	58	58	-	Improving, but new legislation needed
4. = Malaysia	52	55	58	(+3)	Improving, but still too top-down
5. = Taiwan	55	53	56	(+3)	Bold policy moves, can they be sustained?
7. = India	48	51	54	(+3)	Bouncing back, Delhi more supportive
8. = Korea	45	49	49	-	Indifferent leader, more active regulators
9. = China	49	45	45	-	Focus on SOE reform, enforcement
10. = Philippines	37	41	40	(-1)	Slow reform, improved company reporting
10. = Indonesia	40	37	39	(+2)	Big ambitions, can they be achieved?

Source: Asian Corporate Governance Association

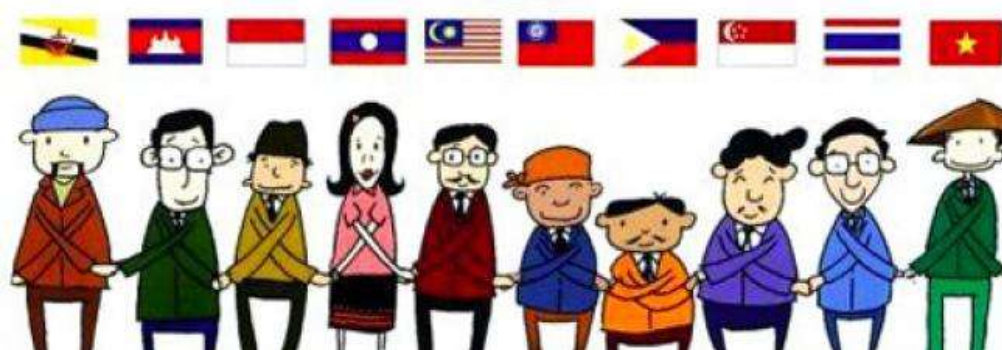
Market category scores: CG Watch 2014

Market category scores						
(%)	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	IGAAP	CG Culture
1. = Hong Kong	65	61	71	69	72	51
1. = Singapore	64	63	56	64	85	54
3. Japan	60	48	62	61	72	55
4. = Thailand	58	62	51	48	80	50
4. = Malaysia	58	55	47	59	85	43
6. Taiwan	56	48	47	63	75	47
7. India	54	57	46	58	57	51
8. Korea	49	46	46	45	72	34
9. China	45	42	40	44	67	34
10. = Philippines	40	40	18	42	65	33
10. = Indonesia	39	34	24	44	62	32

Source: Asian Corporate Governance Association

PERAN SELURUH STAKEHOLDER

- ❑Pembenahan yang dilakukan oleh Indonesia di antaranya dengan cara memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- ❑Kemudian memperjelas tugas, wewenang dan komunikasi regulator keuangan dalam forum KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).
- ❑Indonesia memiliki *Roadmap* CG baru yang membuat perubahan peraturan yang lebih luas.
- ❑Peningkatan atau kemajuan dalam penerapan peraturan audit sehingga harapan akan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat terwujud.



PENUTUP

Untuk menjadi pemenang dalam kontes ekonomi ASEAN diperlukan tata kelola pemerintahan dan juga perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG hendaknya ditegakkan dalam berbagai elemen *stakeholder* negeri ini baik pemerintah maupun pihak swasta, prinsip-prinsip tersebut meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientas pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.



Terima Kasih

Indonesia Siap Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN

